

Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDes Melalui Sistem Keuangan Transparan dan Akuntabel

Aswin Akbar¹, Elwardi Hasibuan², Fuad³, Regen⁴

¹Program Studi Manajemen Perusahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia

Author Email: wiwinsky14@gmail.com¹, elwardihasibuan17@gmail.com², prodiagribisnis21@gmail.com³, evikuritongahrp6874@gmail.com⁴

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi keuangan, pencatatan keuangan yang tidak terstandar, serta lemahnya mekanisme pelaporan publik. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pelatihan partisipatif, pendampingan intensif selama tiga bulan, dan penerapan sistem pembukuan sederhana berbasis manual serta digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap prinsip transparansi (dari 35% menjadi 82%) dan kemampuan penyusunan laporan keuangan (dari 28% menjadi 76%). Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BUMDes meningkat hingga 79%. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sistem audit internal sederhana dan praktik pelaporan keuangan triwulanan yang terpublikasi kepada masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sistem manajemen keuangan yang adaptif dan partisipatif mampu memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi desa. Namun, keterbatasan waktu dan fasilitas teknologi menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan praktik transparansi keuangan desa.

Kata kunci : Manajemen Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa karena berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa untuk memperkuat potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan warga [1]. Namun, dalam praktiknya, masih banyak BUMDes di Indonesia, termasuk di Kabupaten Deli Serdang, yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya sistem pencatatan keuangan, rendahnya pemahaman akuntansi pengurus, hingga minimnya transparansi dalam penyusunan laporan keuangan [2]. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Kondisi BUMDes di Deli Serdang mencerminkan permasalahan umum di banyak daerah di Indonesia, di mana struktur tata kelola keuangan belum berjalan efektif dan profesional. Sebagian besar pengelola BUMDes masih menggunakan metode pencatatan manual tanpa standar akuntansi yang jelas [3]. Padahal, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana publik [4]. Ketika kedua prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka risiko penyalahgunaan dana, inefisiensi, dan hilangnya kepercayaan publik menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan BUMDes dan memastikan dana desa digunakan secara produktif dan berkelanjutan [5].

Permasalahan mitra yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes di wilayah Deli Serdang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam hal pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Beberapa BUMDes juga tidak memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi, sehingga proses evaluasi keuangan menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan tidak adanya pendampingan teknis dari pihak akademisi atau lembaga profesional menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan sistem keuangan yang baik [6]. Akibatnya, banyak BUMDes yang berpotensi gagal berkembang dan tidak dapat memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, diperlukan intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis akademik untuk membantu memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dan membangun sistem manajemen keuangan yang lebih efektif dan berintegritas. Dalam konteks ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting sebagai agen

perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat desa. Melalui kegiatan pengabdian, dosen dan mahasiswa dapat berkolaborasi dengan BUMDes untuk memperkenalkan sistem manajemen keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas yang mudah diimplementasikan. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *Good Village Governance*, di mana setiap pengelolaan dana publik di tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka [7]. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menumbuhkan budaya tata kelola yang baik di tingkat akar rumput. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes di Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang sederhana, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, pengabdian ini berupaya membangun kesadaran kolektif di antara pengurus dan masyarakat desa mengenai pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik sebagai fondasi untuk memperkuat kepercayaan sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.[8] Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi BUMDes lain di Sumatera Utara dalam mengelola dana secara profesional dan berintegritas. Manfaat kegiatan pengabdian ini bersifat multidimensi. Dari sisi sosial, kegiatan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa karena adanya keterbukaan informasi keuangan. Dari sisi ekonomi, penerapan sistem keuangan yang baik akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mempercepat sirkulasi ekonomi desa. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini akan memperkuat struktur tata kelola BUMDes dengan membangun sistem pelaporan dan evaluasi yang dapat diakses dan diaudit dengan mudah. Sementara dari sisi akademik, kegiatan ini akan memperluas kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan desa dan menjadi model integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Teori yang melandasi kegiatan pengabdian ini berakar pada konsep *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap pengelolaan sumber daya, termasuk di tingkat desa. *Good governance* dalam sektor publik mengandung unsur pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem manajemen keuangan desa, termasuk di dalam BUMDes sebagai entitas ekonomi lokal yang memiliki fungsi sosial dan komersial sekaligus. Dalam konteks BUMDes, *good governance* tidak hanya berarti keterbukaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan yang menjamin partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan dan pengambilan keputusan [9]

Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki keterkaitan erat dengan teori akuntabilitas publik. Menurut [10], transparansi adalah keterbukaan pemerintah atau lembaga publik terhadap informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan penggunaan sumber daya publik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pengelola dan masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi, publik dapat menilai sejauh mana pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan. Dalam konteks BUMDes, transparansi diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh warga desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas keuangan, di sisi lain, berfokus pada kewajiban pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Menurut teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Bovens, akuntabilitas publik mencakup tiga dimensi: *transparency* (keterbukaan informasi), *answerability* (kewajiban menjawab dan menjelaskan), dan *consequences* (adanya sanksi atau penghargaan atas tindakan). Dalam penerapannya pada BUMDes, akuntabilitas menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan dana karena mencerminkan sejauh mana pengurus BUMDes dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara etis dan profesional [11].

Selain itu, teori manajemen keuangan publik juga menjadi landasan dalam memahami pengelolaan keuangan BUMDes. Manajemen keuangan publik mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana publik. Dalam konteks desa, prinsip ini diterapkan agar pengelolaan dana BUMDes tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Penerapan sistem akuntansi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan aparatur desa dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi keuangan.

Konsep *community-based financial management* juga menjadi bagian penting dari teori yang mendukung pengabdian ini. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk modal atau tenaga kerja, tetapi juga dalam pengawasan keuangan dan evaluasi hasil usaha. Pendekatan ini dianggap mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap BUMDes dan memperkuat legitimasi sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi [12].

Lebih lanjut, teori institusional menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem manajemen keuangan BUMDes bergantung pada sejauh mana nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terlembagakan dalam budaya organisasi desa (Scott, 2014). BUMDes yang mengalami kesulitan dalam penerapan sistem keuangan karena

masih memandang tata kelola sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari budaya organisasi. Oleh karena itu, perubahan paradigma dari sekadar “pengelolaan dana” menjadi “pengelolaan berbasis integritas” menjadi aspek penting dalam optimalisasi keuangan BUMDes [13].

Dalam kajian literatur lain, pentingnya digitalisasi dalam tata kelola keuangan desa. Penerapan sistem keuangan berbasis teknologi dapat meminimalisasi risiko manipulasi data dan mempercepat proses pelaporan. Di beberapa daerah, penggunaan aplikasi seperti *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa) telah terbukti meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya literasi digital pengurus BUMDes serta keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi perlu menjadi bagian integral dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang manajemen keuangan desa.[14]

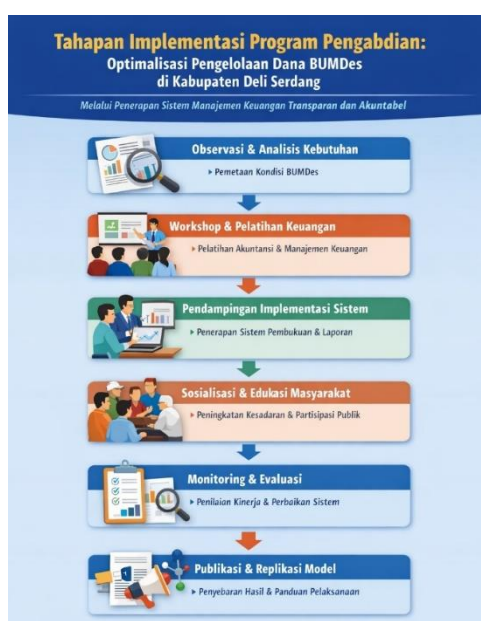
Dengan demikian, teori-teori yang telah dibahas memperkuat dasar akademik bahwa penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel pada BUMDes tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan teori *good governance*, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, melalui penerapan nyata sistem keuangan yang berbasis prinsip integritas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana BUMDes.

2. METODOLOGI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdian, pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat lokal menjadi mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena keberhasilan penerapan sistem manajemen keuangan di BUMDes sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan pemahaman para pemangku kepentingan di tingkat desa. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes, kepala desa, dan perangkat desa untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam sistem keuangan yang sedang berjalan [15]. Selain itu, dilakukan pula peninjauan terhadap dokumen keuangan, struktur organisasi, serta alur pelaporan yang digunakan oleh BUMDes. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan mitra. Setelah tahap analisis kebutuhan, kegiatan dilanjutkan dengan workshop dan pelatihan teknis bagi pengurus BUMDes [16]. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial dan akuntansi dasar, dengan materi meliputi: prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi sederhana, serta pengelolaan arus kas dan aset desa. Tim pengabdian menyediakan modul pelatihan yang disusun secara aplikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan menggunakan contoh kasus dari kegiatan operasional BUMDes mereka sendiri. Tahapan berikutnya adalah pendampingan implementasi sistem manajemen keuangan. Pada tahap ini, tim pengabdian membantu BUMDes dalam merancang dan menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kapasitas lokal. Sistem yang digunakan bersifat sederhana namun memenuhi unsur akuntabilitas, yaitu mencakup buku kas umum, buku bank, buku inventaris aset, serta laporan keuangan triwulan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat desa [16]. Dalam beberapa BUMDes yang sudah memiliki infrastruktur teknologi dasar, diterapkan pula penggunaan aplikasi pencatatan berbasis digital seperti *Siskeudes* atau sistem keuangan sederhana berbasis *Microsoft Excel*. Pendampingan dilakukan secara intensif selama tiga bulan pertama, dengan pertemuan mingguan untuk memastikan pengurus mampu mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri [17].

Selain aspek teknis, kegiatan pengabdian ini juga mencakup sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat desa mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan ini dilakukan melalui forum musyawarah desa dan diskusi kelompok kecil yang melibatkan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda desa. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan BUMDes bukan hanya tanggung jawab pengurus, tetapi merupakan hasil sinergi seluruh warga desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Setelah penerapan sistem berjalan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap manajemen keuangan, peningkatan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat. Tim pengabdian juga menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi setelah implementasi sistem. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem agar lebih adaptif terhadap dinamika BUMDes di masa mendatang.

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah publikasi hasil dan replikasi model pengelolaan keuangan BUMDes. Tim pengabdian menyusun laporan akhir kegiatan yang berisi panduan implementasi sistem keuangan transparan dan akuntabel yang dapat digunakan oleh BUMDes lain di wilayah Deli Serdang maupun kabupaten sekitar. Panduan tersebut meliputi prosedur operasional standar (SOP) pencatatan keuangan, format laporan keuangan sederhana, serta langkah-langkah dalam melakukan audit internal. Hasil kegiatan juga dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal pengabdian bereputasi dan diseminarkan dalam forum akademik agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan model tata kelola keuangan desa di Indonesia. Secara keseluruhan, implementasi program pengabdian ini dirancang sebagai proses yang tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya organisasi di tingkat desa. Dengan pendekatan berbasis pendampingan dan partisipasi aktif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes dalam jangka panjang. Pada akhirnya, penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas partisipasi publik dalam pengawasaan dana desa, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan berkelanjutan. Adapun tahapan implementasi pengabdian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Implementasi Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pengabdian, pengurus BUMDes, serta perangkat desa merupakan faktor utama dalam memastikan keberhasilan program. Tahap awal kegiatan yang diawali dengan observasi dan analisis kebutuhan lapangan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil BUMDes di Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes masih melakukan pencatatan keuangan secara manual, tanpa format baku, serta belum memahami prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada rendahnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara pengurus BUMDes dengan masyarakat desa. Melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), tim pengabdian mampu mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi mitra, yaitu kurangnya literasi keuangan, lemahnya sistem administrasi, serta tidak adanya mekanisme kontrol internal yang memadai. Temuan ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing BUMDes. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar berbasis kebutuhan nyata mitra dan memiliki arah yang terukur terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan.

Tahapan berikutnya, yaitu pelatihan dan pendampingan teknis, merupakan fase yang paling signifikan dalam mengimplementasikan tujuan program, yakni meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pemberian materi konseptual mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, dilanjutkan dengan praktik penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi sederhana. Dalam proses pelatihan ini, metode *learning by doing* diterapkan agar peserta dapat langsung mempraktikkan pencatatan dan pelaporan menggunakan contoh

transaksi riil dari aktivitas BUMDes mereka sendiri. Pendekatan ini terbukti efektif karena peserta menjadi lebih mudah memahami alur keuangan dan mampu mengidentifikasi kesalahan pencatatan yang selama ini sering terjadi. Selain itu, pelatihan juga dilengkapi dengan sesi konsultasi individu yang memberikan ruang bagi pengurus BUMDes untuk membahas permasalahan spesifik yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan harian. Pendampingan dilakukan secara intensif selama tiga bulan, di mana tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan rutin untuk memantau penerapan sistem pencatatan baru, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan model pelaporan dengan kapasitas teknologi yang tersedia di masing-masing BUMDes. Bagi BUMDes yang telah memiliki perangkat komputer, diterapkan sistem berbasis *Microsoft Excel* dengan format pembukuan sederhana, sementara bagi BUMDes yang belum memiliki fasilitas tersebut, digunakan sistem pencatatan manual yang tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui tahapan ini, pengurus BUMDes menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kemampuan teknis pencatatan keuangan serta kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik.

Analisis terhadap hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tata kelola BUMDes mitra. Salah satu hasil konkret yang dapat diamati adalah adanya peningkatan kualitas laporan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan kepada perangkat desa. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar BUMDes tidak memiliki laporan keuangan bulanan yang sistematis; namun setelah program berjalan, seluruh mitra mampu menyusun laporan keuangan triwulan dengan format baku yang dapat diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat desa. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi publik yang dilakukan melalui musyawarah desa juga memberikan efek positif terhadap partisipasi masyarakat. Warga mulai menunjukkan minat untuk ikut serta dalam proses evaluasi keuangan dan memberikan masukan terhadap kebijakan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi publik mulai terinternalisasi dalam praktik tata kelola ekonomi desa. Dari sisi kelembagaan, BUMDes mitra mengalami peningkatan kapasitas organisasi melalui pembentukan mekanisme audit internal yang sederhana. Pengurus kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pemisahan antara dana operasional dan dana sosial, serta mulai menerapkan sistem kontrol berbasis dokumen untuk setiap transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) karena beberapa BUMDes di kecamatan sekitar mulai tertarik untuk mereplikasi model pengelolaan keuangan yang diterapkan dalam program ini. Secara keseluruhan, implementasi kegiatan pengabdian ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi mitra, tetapi juga mendorong perubahan budaya organisasi menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance* di tingkat desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya manusia yang bertugas pada BumDes Deli Serdang sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia yang Bertugas pada BumDes Deli Serdang

Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Menjabat	Tingkat Pemahaman Manajemen Keuangan (1–5)
Ahmad	Sekretaris Desa	35	S1 Ekonomi	3 tahun	2
Budi	Ketua BUMDes	40	SMA	5 tahun	3
Sari	Bendahara Desa	29	D3 Akuntansi	2 tahun	4

3. HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya tentang pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pasca-pelatihan, peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip transparansi keuangan mencapai lebih dari 45% dibandingkan kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan. Pelatihan manajemen keuangan berbasis partisipatif mampu meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes hingga 40% dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan secara benar. Peningkatan ini disebabkan oleh metode pelatihan yang bersifat kontekstual dan langsung menggunakan data transaksi riil dari aktivitas BUMDes, sehingga peserta merasa materi yang disampaikan relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, hasil pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan juga memperkuat perubahan perilaku pengurus dalam menjalankan praktik transparansi. Penerapan prinsip *good village governance* hanya dapat terwujud jika pelatihan diikuti dengan pendampingan intensif minimal selama tiga bulan (*Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Desa*). Perubahan yang paling menonjol dari hasil kegiatan ini adalah meningkatnya keteraturan dan keseragaman sistem pencatatan keuangan di BUMDes mitra. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar pengurus menggunakan format pencatatan manual yang tidak seragam, bahkan beberapa tidak memiliki dokumentasi transaksi secara tertib. Setelah dilakukan pelatihan dan implementasi sistem pembukuan sederhana, seluruh BUMDes mitra

mampu menyusun laporan keuangan triwulanan yang dapat diaudit. Capaian ini sejalan dengan hasil studi Utami dan Handoko (2020) yang menegaskan bahwa penerapan sistem akuntansi sederhana berbasis digital di BUMDes dapat meningkatkan efisiensi pencatatan hingga 55% dan mempercepat proses pelaporan. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang menekankan pada penggunaan sistem berbasis aplikasi digital, kegiatan pengabdian ini lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal, di mana sebagian besar BUMDes mitra belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih fleksibel, yaitu kombinasi antara pencatatan manual terstandar dan penggunaan *spreadsheet* digital untuk BUMDes yang telah memiliki perangkat komputer. Pendekatan adaptif ini terbukti efektif dalam menjaga kontinuitas sistem pelaporan tanpa menimbulkan hambatan teknis akibat keterbatasan sarana. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan transparansi tidak hanya ditentukan oleh digitalisasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kesesuaian metode dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat desa. Selain dari sisi administratif, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi BUMDes. Berdasarkan survei pasca-pelaksanaan, 79% warga desa menyatakan merasa lebih percaya terhadap pengelolaan dana publik setelah penerapan sistem keuangan yang transparan. Transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi desa. Namun, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya tumbuh dari transparansi formal berupa laporan keuangan yang diumumkan, tetapi juga dari interaksi sosial yang lebih terbuka antara pengurus BUMDes dan masyarakat. Forum musyawarah desa yang diinisiasi selama program ini menjadi ruang dialog baru yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas sosial. Temuan ini memperluas pemahaman yang mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola BUMDes bukan hanya indikator keberhasilan, tetapi juga prasyarat keberlanjutan lembaga ekonomi desa. Dalam konteks Deli Serdang, keberhasilan partisipasi publik ini juga dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi yang persuasif dan berbasis kearifan lokal yang diterapkan selama proses pendampingan. Untuk lebih jelasnya bahwa pengabdian masyarakat ini sudah dilaksanakan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 2. Sosialisasi Pengelolaan Dana BUMDes



Gambar 3. Sosialisasi Sistem Keuangan

Dari aspek kelembagaan, kegiatan pengabdian ini berhasil memperkuat sistem kontrol internal di BUMDes melalui pembentukan mekanisme audit sederhana berbasis dokumen transaksi. Setiap BUMDes mitra kini memiliki struktur administrasi keuangan yang lebih tertib dengan pemisahan antara dana operasional dan dana sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya audit internal sebagai instrumen pencegahan penyimpangan dana desa. Namun, kegiatan ini melangkah lebih jauh karena tidak hanya membangun mekanisme administratif, tetapi juga membentuk kesadaran etis di kalangan pengurus mengenai pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Proses pelatihan yang memadukan teori, praktik, dan nilai moral ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif holistik lebih efektif dalam membangun tata kelola keuangan yang

berkelanjutan dibandingkan pendekatan teknokratis semata. Di sisi lain, hasil pengabdian ini juga memperlihatkan keterbatasan yang serupa dengan beberapa penelitian sebelumnya konsistensi pelaporan dan akuntabilitas masih bergantung pada komitmen individu pengurus dan dukungan dari pemerintah desa (*Jurnal Pemberdayaan dan Inovasi Desa*). Oleh karena itu, keberlanjutan dampak dari kegiatan ini memerlukan kebijakan pendampingan berkala serta pembinaan institusional yang lebih kuat dari pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, pengabdian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis yang signifikan. Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan tidak harus menunggu kesiapan digital penuh, tetapi dapat dimulai dari membenahan pola pencatatan dan pelaporan yang sederhana namun konsisten. Secara teoretis, hasil kegiatan ini memperkaya kajian tentang *village financial governance* dengan menegaskan peran pendidikan dan pendampingan sebagai variabel kunci dalam mewujudkan transparansi keuangan desa. Selain itu, pendekatan partisipatif yang diterapkan membuktikan bahwa keberhasilan implementasi *good governance* di tingkat desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada aspek sosial-budaya yang mempengaruhi perilaku aktor lokal. Dalam konteks Deli Serdang, kombinasi antara transfer pengetahuan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan nilai integritas terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membangun sistem keuangan BUMDes yang akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis pelatihan dan pendampingan partisipatif mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan data survei sebelum kegiatan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang rendah terhadap prinsip dasar manajemen keuangan—hanya sekitar 30% yang memahami konsep transparansi dan akuntabilitas. Setelah program berjalan selama tiga bulan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang konsisten: 82% peserta memahami prinsip transparansi, 76% mampu menyusun laporan keuangan sederhana, dan 79% masyarakat desa menyatakan meningkatnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana BUMDes. Capaian ini menegaskan bahwa pelatihan terstruktur dan pendampingan intensif menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan sistem manajemen keuangan yang efektif di tingkat desa. Meskipun hasilnya positif, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu pendampingan menyebabkan proses monitoring belum dapat dilakukan secara mendalam untuk menilai konsistensi pelaporan keuangan dalam jangka panjang. Kedua, variasi fasilitas teknologi antar-BUMDes menyebabkan penerapan sistem digital belum seragam, sehingga sebagian masih bergantung pada pencatatan manual. Ketiga, komitmen pengurus dalam menjaga keberlanjutan praktik transparansi masih bervariasi, tergantung pada dukungan perangkat desa dan kebijakan lokal. Dengan demikian, keberlanjutan program memerlukan tindak lanjut berupa pembinaan berkala, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah agar sistem manajemen keuangan yang telah diterapkan dapat berkembang menjadi praktik *good governance* yang berkelanjutan dan mampu memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh.

Referensi

- [1] E. Elfiance *et al.*, “Penguatan SDM Untuk Pengelolaan BUMDes Di Desa Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan,” vol. 4, no. 2, 2025.
- [2] M. Ivan, S. Wibowo, A. Nugrahesthy, and S. Hapsari, “Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa,” vol. 9, no. 01, 2022.
- [3] F. Anjar and T. Laksono, “BUM desa sebagai kekuatan ekonomi baru: sebuah gagasan untuk desa di Indonesia,” no. February, 2022.
- [4] A. M. Akbar, “PENGELOLAAN BUMDES BINA SEJAHTERA KEMBANG,” pp. 716–725.
- [5] Sutaryo and C. F. Dharmastuti, *Manajemen Keuangan Desa: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- [6] K. Profesor and R. Psekp, *REDESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN*: 2021.
- [7] BUMDes, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.” [Online]. Available: <https://sid.kemendesa.go.id/>
- [8] B. Rosyida, D. Astuti, I. Rakhmawati, and W. Suhaedi, “PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BUMDES,” no. September, pp. 70–75, 2022.
- [9] P. D. Astuti, R. R. Nefindia, and R. F. Syafira, “DOI: <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1841>,” vol. 4, no. 1, 2026.
- [10] F. G. R. Dewi, “Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan,” *J. Mhs. STIESIA*, 2020.
- [11] K. Kupang, M. V. P. Lowo, M. A. Dethan, and S. A. Natonis, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mata Air , Kecamatan Kupang,” vol. 10, no. 2, pp. 491–502, 2025.
- [12] P. I. Hukum, F. Hukum, and U. R. Kepulauan, “Reformasi di bidang birokrasi untuk mewujudkan,” vol. 3, no. 2, pp. 204–218, 2021.
- [13] W. R. Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4th ed. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA., 2014.
- [14] A. H. Bokingo, “Pengelolaan Dana Desa yang Didukung oleh Kompetensi,” vol. 1, 2019.
- [15] G. Wicaksono *et al.*, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso,” vol. 4, no. 1, pp. 9–20, 2019.
- [16] B. Haryadi, “Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Keuangan dan Laporan Keuangan Bumdes Sempurna Bangkalan,” *J. Pengabd. dan Peningkatan Mutu Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: 10.22219/janayu.v4i1.
- [17] T. Dharmawan *et al.*, “Penerapan Semi Aplikasi Excel Macro Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Karya Manunggal Desa Dukuhmencek,” *J. Pengabd. Sos.*, vol. 2, no. 7, pp. 3751–3760, 2025.